

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya telah dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang harus dibuat oleh seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Tabalong setelah habis masa Tahun Anggaran yang akan dirangkum sebagai penilaian pertanggungjawaban sebuah SKPD oleh Bupati Tabalong serta sebagai bahan Evaluasi Pertanggungjawaban Kabupaten Tabalong kepada Pemerintah Pusat.

Dengan dibuatnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, menandakan bahwa kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada Bupati Tabalong.

Akhirnya tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong ini maka akan diperbaiki sebagaimana diharapkan.

Tanjung, Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong,



Drs. ARBUANSYAH, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19730207 199311 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A.GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH.....	4
2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	4
3. JUMLAH PEGAWAI, JENJANG PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN,	5
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	5
B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN	12
1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH	12
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	14
3. PROGRAM SRATEGIS TAHUN 2025 (sesuai Renja 2025).....	16
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	21
BAB II.....	23
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	23
A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	23
B. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025.....	30
BAB III	31
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	31
A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL)	31
B.GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL).....	31
C.CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL).....	31
D.HAMBATAN DAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELASAIAN (SARAN/TINDAKLANJUT)	32
BAB IV	33
A.CAPAIAN MAKRO ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025.....	33
BAB V.....	34
PENUTUP	34

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Letak Geografis Kabupaten Tabalong yang sangat strategis di antara dua Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, serta semakin pesatnya pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Tabalong, menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kota yang berkembang dengan cepat. Perkembangan yang dimaksud tidak hanya dapat memacu hal-hal yang bersifat positif namun dapat memacu akan timbulnya berbagai gejolak politik sosial, ekonomi, budaya dan agama serta Kamtibmas yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, maka pembangunan Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program yang mutlak harus dilaksanakan, karena Kondisi Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban suatu wilayah sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Roda pemerintahan tak akan berjalan dengan lancar bila tidak didukung dengan situasi Politik dan Kamtibmas yang mantap dan terkendali.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabalong yaitu : **“Menuju Tabalong Smart (Sejahtera, Maju, Religius Dan Terdepan)”** maka persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Tabalong harus tetap di jaga. Persatuan dan Kesatuan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Selain Persatuan dan Kesatuan ada hal yang lebih penting lagi guna mewujudkan visi Kabupaten Tabalong yaitu kehidupan yang demokratis, dinamis dan aman. Apabila masyarakat Kabupaten Tabalong hidup secara demokratis, dinamis dalam segala hal serta dapat menjaga keamanan maka diharapkan visi Kabupaten Tabalong dapat terwujud.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);

2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yaitu :

1. BANGUNAN GEDUNG BADAN

Prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah 1 (satu) buah gedung yang digunakan sebagai Badan beralamatkan pada Jalan Jaksa Agung Soeprapto Nomor 89 Kec. Tanjung. Dalam sarana gedung masih ada yang kurang yaitu tidak adanya ruang rapat dan tempat parkir yang kecil.

2. SARANA MOBILITAS

Sarana Kendaraan Dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

No.	Kualifikasi	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	4 (empat) buah
2.	Kendaraan roda 2	8 (delapan) buah

3. SARANA PENUNJANG KERJA LAINNYA

Sarana Badan antara lain berupa perabot-perabot yang digunakan untuk kegiatan kerja di Badan seperti meja kerja, kursi kerja, meja dan kursi tamu, komputer, televisi dan lain-lain yang berada di Badan dan dapat menunjang kelancaran kerja. Secara menyeluruh kondisi sarana Badan seperti di atas dalam keadaan baik walaupun sebagian besar sudah mulai tidak layak digunakan untuk menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. JUMLAH PEGAWAI, JENJANG PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Tabel 1

Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kualifikasi	Jumlah (orang)
I.	Jenjang Pendidikan	
1.	SD/ sederajat	-
2.	SLTP/ sederajat	1 (satu) orang
3.	SLTA/ sederajat	1 (satu) orang
4.	Diploma/ Sederajat/D3	-
5.	S1	11 (sebelas) orang
6.	S2	5 (lima) orang
7.	S3	-
II.	Pangkat/Golongan Ruang	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 (satu) orang
2.	Pembina (IV/a)	3 (tiga) orang
3.	Penata TK.I (III/d)	5 (lima) orang
4.	Penata (III.c)	4 (empat) orang
5.	Penata Muda TK.I (III.b)	1 (satu) orang
6.	Penata Muda (III.a)	2 (dua) orang
7.	Pengatur Muda (II.a)	2 (dua) orang
III.	Pejabat	
1.	Struktural	18 orang
2.	Non Eselon	-

- PNS 18 (delapan belas) orang
 1. S2 sebanyak 5 (lima) orang.
 2. S1 sebanyak 11 (sebelas) orang
 3. SLTA sebanyak 1 (satu) orang
 4. SLTP sebanyak 1 (satu) orang
- PPPK 8 (delapan) orang
 1. S1 sebanyak 6 (enam) orang
 2. SLTA sebanyak 1 (satu) orang
 3. SLTP sebanyak 1 (satu) orang
- Tenaga outsourcing 4 (empat) orang
 1. S1 sebanyak 1 (satu) orang
 2. SLTA sebanyak 1 (satu) orang
 3. SD sebanyak 1 (satu) orang

Tabel. 2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tabalong Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki – laki	11	67%
2.	Perempuan	7	33 %
	Jumlah	18	100 %

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2025



Tabel .3
Jumlah Tenaga Outsourcing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentasi
1.	Laki – laki	2	50 %
2.	Perempuan	2	50 %
	Jumlah	4	100 %



Sedangkan jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan ruang sebagai berikut

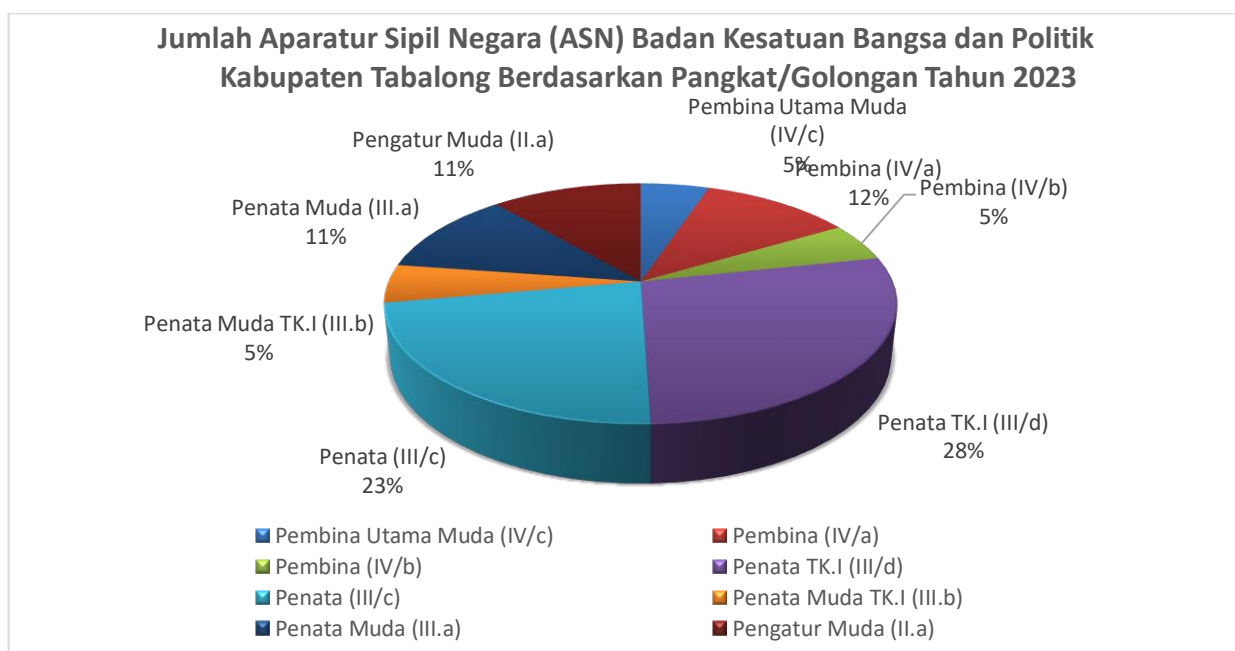
:

1. Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang.
2. Pembina (IV/a) Sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Pembina (IV/b) Sebanyak 1 (satu) orang.
4. Penata TK.1 (III /d) sebanyak 5 (lima) orang.
5. Penata (III.c) sebanyak 4 (empat) orang.
6. Penata Muda TK.I (III.b) sebanyak 1 (satu) orang.
7. Penata Muda (III.a) sebanyak 2 (dua) orang.
8. Pengatur Muda (II.a) sebanyak 2 (dua) orang.
9. IX sebanyak 5 (lima) orang

Tabel 4
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	5%
2.	Pembina (IV/a)	2	11%
3.	Pembina (IV/b)	1	5%
4.	Penata TK.1 (III/d)	5	27%
5.	Penata (III.c)	4	22%
6.	Penata Muda TK.I (III.b)	1	5%
7.	Penata Muda (III.a)	2	11%
8.	Pengatur Muda (II.a)	2	11%
9.	IX	1	5%
	Jumlah	18	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2025



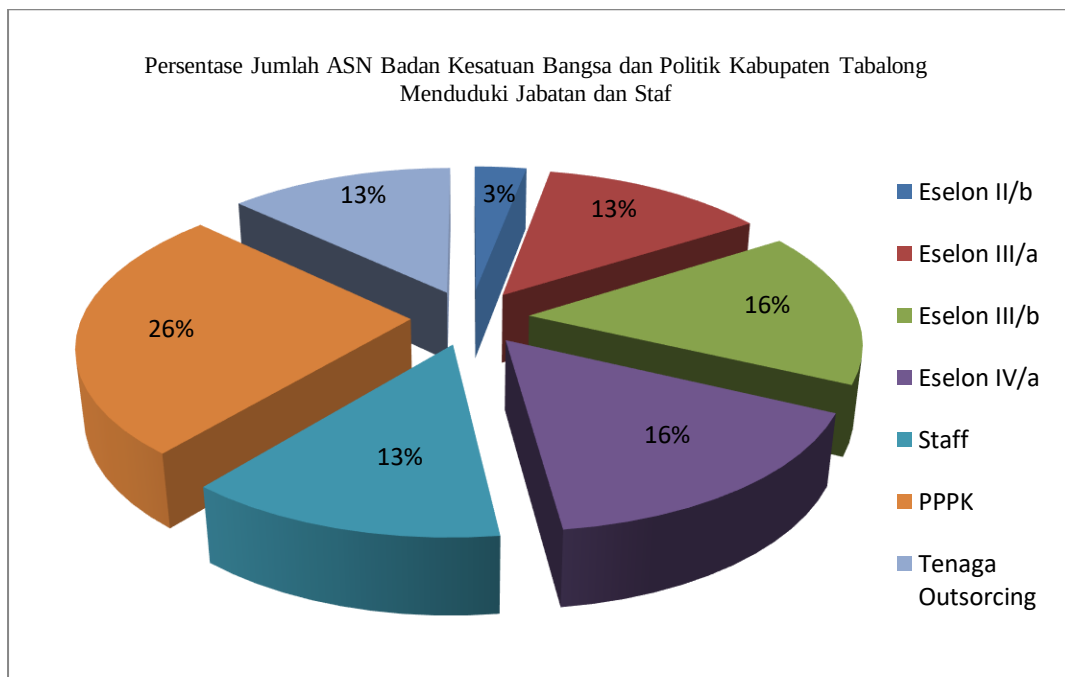
Jumlah pejabat struktural yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebanyak 7 (tujuh) orang dan fungsional sebanyak 6 (enam) orang dari 12 (dua belas) jabatan yang tersedia.

Sedangkan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Penelaah Teknis Kebijakan sebanyak 3 (tiga) orang
2. Pengadministrasi Perkantoran 2 (dua) orang
3. Operator Layanan Operasional 1 (satu) orang

Tabel. 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
Yang Menduduki Jabatan dan Staf/tenaga kontrak Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Eselon II/b	1	3%
2.	Eselon III/a	4	13%
3.	Eselon III/b	5	16%
4.	Eselon IV/a	5	16%
5.	Staf	4	13%
6.	PPPK	8	26%
7.	Tenaga Outsourcing	4	13
	Jumlah	27	100%



Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tabalong Tahun 2019 Nomor 44):

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :

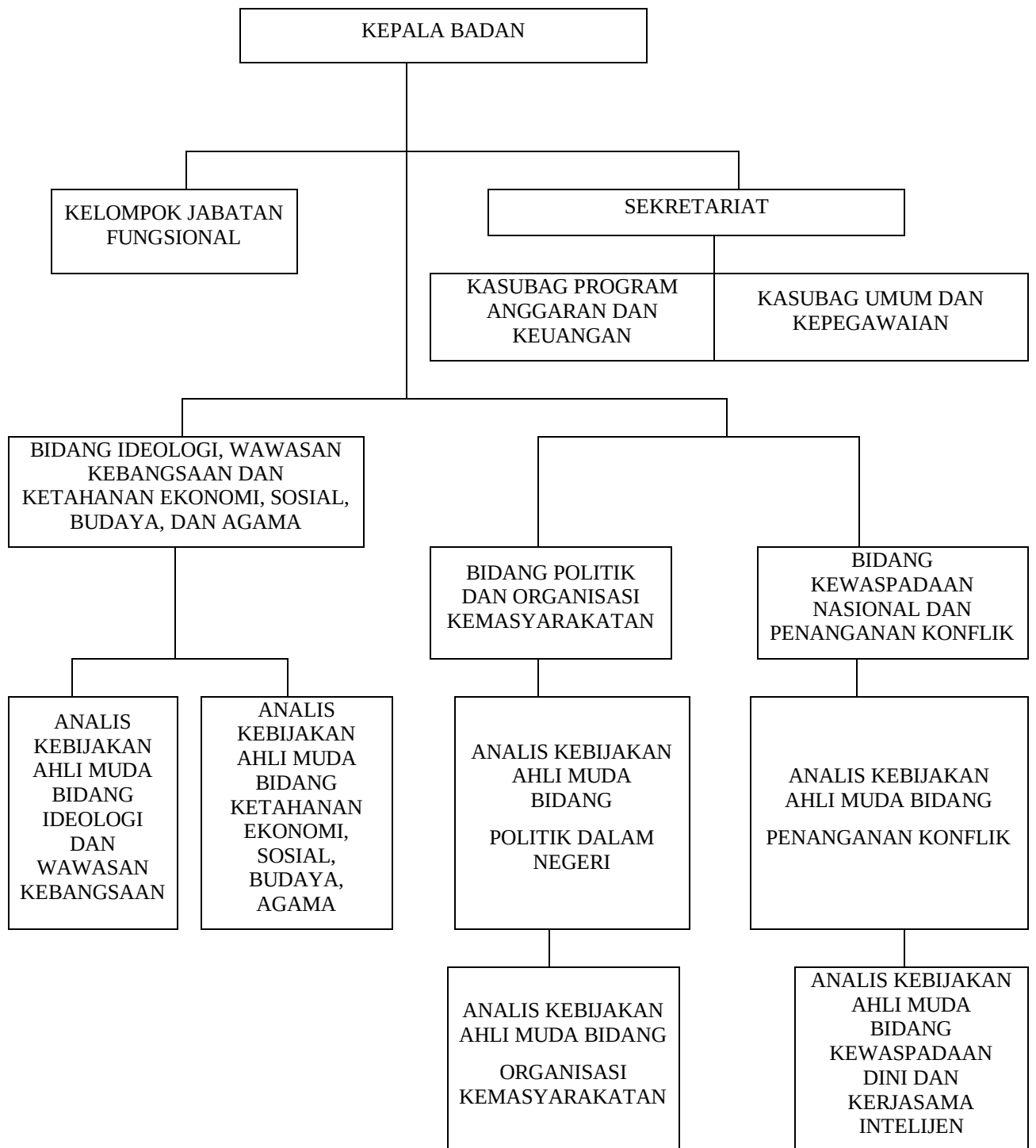
- a. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen.
4. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Politik Dalam Negeri.
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sampai akhir tahun 2025 jabatan yang terisi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebanyak :

1. Esselon II sebanyak 1 (satu) jabatan dari 1 (satu) jabatan yang tersedia.
2. Esselon III sebanyak 4 (empat) orang dari 4 (empat) jabatan yang tersedia.
3. Esselon IV sebanyak 8 (delapan) orang dari 9 (sembilan) jabatan yang tersedia.
4. Staf Sekretariat sebanyak 2 (dua), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 1 (satu) orang, Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) orang, Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 1 (satu) orang, PPPK sebanyak 8 (delapan) orang.

Sehingga keseluruhan jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian PNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan PPPK sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Outsourcing 4 (empat) orang.

Berikut Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong



B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

VISI : Menuju Tabalong Smart (Sejahtera, Maju, Religius Dan Terdepan)			
VISI BADAN KESBANGPOL : Terwujudnya Kehidupan Yang Demokratis, Dinamis, Aman Serta Kokohnya Persatuan Dan Kesatuan Dalam Bingkai NKRI			
MISI BADAN KESBANGPOL : <ul style="list-style-type: none">- Menumbuhkembangkan Kehidupan Politik Dan Masyarakat Yang Demokratis Dan Transparan, Berbasis Pada Partisipasi Aktif, Kreatif Dan Kemandirian Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia- Memperkokoh Rasa Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia			
MISI III RPJMD : Mengembangkan Kehidupan yang Religius			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Meningkatnya kesadaran berpolitik warga negara	1. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung program 2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan	1. Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat
	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan warga negara untuk meningkatkan rasa nasionalisme, seperti mengamalkan	Meningkatkan nasionalisme harus fokus pada pendekatan dan partisipasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, sekolah dan

		Pancasila, cinta tanah air, pendidikan kewarganegaraan, penggunaan produk dalam negeri	media serta memanfaatkan berbagai saluran komunikasi
	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial	<p>1. Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif</p> <p>2. Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah actual strategi potensi kerawanan konflik</p> <p>3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban</p>	<p>1. Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus untuk dapat diantisipasi dan diselesaikan.</p> <p>2. Pemberdayaan kerukunan umat antar beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan.</p> <p>3. Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas.</p> <p>4. Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.</p>
MISI IV : Menjadi Daerah yang Terdepan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Laporan AKIP tepat waktu - Membuat dokumen kinerja sesuai ketentuan 	<p>1. Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran.</p> <p>2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat LPPD & LKPJ tepat waktu - Membuat laporan keuangan tepat waktu - Memverifikasi dokumen keuangan tepat waktu - Menindaklanjuti temuan BPK/Inspektorat 	3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran. 4. Rapat-rapat koordinasi 5. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja.
--	--	---	--

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan teknik yang dikembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya Internal Aparatur Pemerintah (Suprastruktur). Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta seluruh masyarakat pada umumnya.

Strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung program.
- 2) Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif
- 3) Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah aktual strategi potensi kerawanan konflik.
- 4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.
- 5) Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Gatra Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan Dan Ketertiban.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka kebijakan strategis dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus agar dapat diantisipasi dengan cepat.
- b. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan.
- c. Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas.
- d. Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.

- e. Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat.

3. PROGRAM SRATEGIS TAHUN 2025 (sesuai Renja 2025)

Tabel .1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN WAJIB								
1.05.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.451.116.212				7.740.953.094
8.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Tabalong	11 buah	167.647.524	APBD		11 buah	100.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	Kab. Tabalong	12 bulan	5.322.070.000	APBD		12 bulan	5.358.190.000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	Kab. Tabalong	12 bulan	31.421.828	APBD		12 bulan	30.682.285
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kab. Tabalong	12 bulan	1.042.232.787	APBD		12 bulan	628.652.383

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tabalong	20 unit	465.745.906	APBD		20 unit	76.317.084
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	Kab. Tabalong	12 bulan	874.677.316	APBD		12 bulan	779.950.491
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	Kab. Tabalong	18 unit	547.320.851	APBD		18 unit	767.160.851
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Kab. Tabalong		2.087.202.300	APBD			6.772.282.118
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan		60 orang	2.087.202.300	APBD		60 orang	6.772.282.118

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Kab. Tabalong		1.721.680.430	APBD			1.981.707.568
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Kab. Tabalong	12 bulan	1.721.680.430	APBD		12 bulan	1.981.707.568

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN		Kab. Tabalong		1.287.273.570	APBD			473.033.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	Kab. Tabalong	12 bulan	1.287.273.570	APBD		12 bulan	473.033.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Kab. Tabalong		672.482.534	APBD			612.139.420
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	Kab. Tabalong	12 bulan	672.482.534	APBD		12 bulan	612.139.420

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kab. Tabalong		11.456.643.512	APBD			1.089.357.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Kab. Tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	11.456.643.512	APBD		Masyarakat, 8 forum dan orang asing	1.089.357.000

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong disusun dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program. Prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2025 pada dasarnya merupakan prioritas pembangunan tahun rencana yang dianalisis dari :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD serta reconfusing dan Perubahan anggaran 2025 berjalan dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Tahun 2019-2025
2. Analisis Kebijakan Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tabalong
4. Analisis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan
5. Analisis prioritas dan sasaran pembangunan daerah
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tujuan pembangunan Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Poros Segitiga Emas melalui Pemberdayaan Sektor Infrastruktur dan Transportasi, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.
 - 2) Meningkatnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Peningkatan Produk-produk Kreatif Unggulan Daerah yang Inovatif, dengan sasaran :
 - 1) Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas.
 - 2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
 - 3) Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Kreatif, dengan sasaran :
 - 1) Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat.
 - 3) Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.
 - 4) Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengurangan Kemiskinan, dengan sasaran :
 - 1) Menurunnya angka kemiskinan.
 - 2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.
 - 3) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Peningkatan Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Publik, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - 2) Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif.

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
- Kinerja Program Prioritas Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Selama kurun waktu 5 tahun sebelumnya yaitu mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.1
Capaian Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Tabel 2.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1.	Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	167.647.542	Tersusunnya 8 Dokumen DPA, DPA Perubahan. Dokumen LAKIP, LKPI, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Perjanjian Kinerja, Renja, Renstra	152.252.300	Tersusunnya 8 Dokumen DPA, DPA Perubahan. Dokumen LAKIP, LKPI, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Perjanjian Kinerja, Renja, Renstra	-	-
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	5.322.070.000	Pembayaran gaji ASN selama 12 bulan	4.346.401.970	Pembayaran gaji ASN selama 12 bulan	-	-
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah yang disusun	31.421.828	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengadaan pakaian dinas	24.772.700	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengadaan pakaian dinas	-	-
				4. Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya	1.042.232.787	Penyediaan alat listrik, alat tulis	918.592.195	Penyediaan alat listrik,	-	-

				Perangkat Daerah	a administrasi umum perangkat daerah		kantor, barang cetakan, penggandaan, serta perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, luar daerah luar provinsi selama 12 bulan		alat tulis kantor, barang cetakan, penggandaan, serta perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, luar daerah luar provinsi selama 12 bulan		
				5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	465.745.906	Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor, mebeleur, alat pendingin, meja kursi pejabat, personal computer, dan peralatan computer lainnya	380.868.130	Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor, mebeleur, alat pendingin, meja kursi pejabat, personal computer, dan peralatan computer lainnya		
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	874.677.316	Pembayaran telepon, sumber daya air, listrik, internet, materai, dan honorarium tenaga kontrak	607.844.827	Pembayaran telepon, sumber daya air, listrik, internet, materai, dan honorarium tenaga kontrak	-	-
				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	547.320.851	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta pemeliharaan sarana prasarana	541.158.356	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta pemeliharaan sarana	-	-

				Pemerintah Daerah			pendukung gedung kantor		prasarana pendukung gedung kantor		
2.	Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	2.087.202.300	Sosialisasi para pelajar SLTA/ sederajat	1.653.568.107	Sosialisasi para pelajar SLTA/ sederajat	Jumlah peserta sosialisasi masih terbatas dan peserta selama ini hanya para pelajar SLTA/ sederajat, belum mencakup elemen masyarakat dan hanya dilakukan di Kabupaten/kota	Di perlukan ketersediaan anggaran/ penambahan anggaran
3.	Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	1.721.680.430	Untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran bantuan keuangan kepada 8 parpol (PAN, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang memperoleh kursi legislative DPRD Kab. Tabalong	1.695.620.110	Untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran bantuan keuangan kepada 8 parpol (PAN, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang	Kurangnya SDM yang ada dikepengurusan parpol dalam pembuatan SPJ terutama dalam pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, adanya pergantian kepengurusan dalam parpol, masih kurangnya jumlah bimtek yang dilakukan kepada parpol, terlambatnya laporan camat kepada Badan Kesbangpol, kurangnya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan, sehingga tidak	Melakukan bimtek pengelolaan keuangan parpol, melakukan pembimbingan kepada pengurus parpol dalam melakukan pembuatan SPJ sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melakukan pemantauan secara langsung ke kecamatan, melakukan sosialisasi ke sekolah/kecamatan, secara optimal, melakukan upaya usulan penambahan dana kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan dibidang politik.

				Situasi Politik			periode 2019-2025 TA.2025, Bimbingan teknis pengelolaan keuangan partai politik, pemantauan politik daerah, penyuluhan kepada masyarakat dan pemantauan pemilihan kepala desa		memperoleh kursi legislative DPRD Kab. Tabalong periode 2019-2025 TA.2025, Bimbingan teknis pengelolaan keuangan partai politik, pemantauan politik daerah, penyuluhan kepada masyarakat dan pemantauan pemilihan kepala desa	semua elemen masyarakat dapat mengikutinya, kurangnya jumlah dana yang tersedia.	
4.	Unsur Pemerintah an Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan LSM dan ormas	1.287.273.570	Pertemuan/diskusi publik LSM dengan SKPD Pemkab Tabalong, Peningkatan wawasan Kebangsaan anggota LSM keluar daerah (Surabaya)	944.977.340	Pertemuan/diskusi publik LSM dengan SKPD Pemkab Tabalong, Peningkatan wawasan Kebangsaan anggota LSM keluar daerah (Surabaya)	Masih kurangnya jumlah pertemuan dengan SKPD yang dilakukan 1 tahun, kemampuan SDM anggota LSM masih cukup rendah, masih kurangnya pembinaan terhadap ormas khususnya LSM, sulitnya melakukan pendataan	Melakukan penggabungan kepada SKPD dalam kegiatan diskusi public, melakukan peningkatan wawasan kebangsaan kepada anggota LSM kalau perlu disertai bimtek, perlunya melakukan pembinaan dan pengawasan secara intens kepada ormas khususnya kepada LSM, melakukan upaya usulan penambahan dana

										keberadaan ormas untuk dijadikan data yang valid	kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan dibidang ormas.
5.	Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	672.482.534	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosialisasi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.	463.099.850	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosialisasi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial	Kurangnya sosialisasi dan monitoring ke lapangan	Di perlukan ketersediaan anggaran

									budaya dan agama dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.		
6.	Unsur Pemerintahan Umum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	11.456.643.512	Melaksanakan rapat forum-forum dan tim-tim FPK (forum pembauran kebangsaan), FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat), tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan pemerintah daerah di kabupaten dan di kecamatan, melaksanakan monitoring hari raya idul fitri, hari natal dan tahun baru.	10.755.109.190	Melaksanakan rapat forum-forum dan tim-tim FPK (forum pembauran kebangsaan), FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat), tim terpadu penanganan konflik sosial dan tim kewaspadaan pemerintah daerah di kabupaten dan di kecamatan, melaksanakan monitoring hari raya idul fitri, hari natal dan tahun baru.	Tim dan forum-forum daerah yang di daerah menangani deteksi dini dan penanganan konflik belum bekerja maksimal. Pada kegiatan penanganan orang asing masih adanya data yang tidak sinkron antar instansi terkait.	Koordinasi tim pemantau yang di bentuk harus bekerja maksimal.

B. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025	TINDAKLANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL)

(Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan) (NIHIL)

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL)

Tabel 3.1

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Urusan yang ditugaspembantuankan, Kegiatan, Anggaran

No.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Urusan yang ditugaspembantuankan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

C. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL)

1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.2

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten (NIHIL)

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian Pertanian	Permen/Per LPNK.	Program Kegiatan Output : Rincian Kegiatan	Tidak ada	Belum Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten (NIHIL)

Tabel 3.3
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten (NIHIL)

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan Output dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bidang :	PerGub No	Program : Kegiatan : Output : Rincian Kegiatan :	Tidak ada	Belum Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya (Pemerintahan Desa) (Nihil)

Tabel 3.4
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan kepada Pemerintahan Desa (NIHIL)

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan Output dan Rincian Kegiatan	Desa Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bidang :	PerGub No	Program : Kegiatan : Output : Rincian Kegiatan :	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Tidak melakukan	Tidak ada	Belum Melakukan

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELASAAN (SARAN/TINDAKLANJUT) (NIHIL)

BAB IV

CAPAIAN MAKRO ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN

A. CAPAIAN MAKRO ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka untuk menjabarkan dan mengimplimentasikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dirumuskan program kerja sesuai prioritas adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran yang akuntabel.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Diharapkan dengan diadakan sosialisasi ini diharapkan para pelajar SLTA/ sederajat dapat mengerti/memahami ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara khususnya 4 pilar kebangsaan pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Terlaksananya pembayaran bantuan keuangan kepada 10 parpol yang memperoleh kursi legislative DPRD Kab.Tabalong periode 2019-2025 TA.2025, bimbingan teknis pengelolaan keuangan kepada 10 parpol, pemantauan politik daerah ke 12 kecamatan, penyuluhan kepada masyarakat berupa sosialisasi ke 12 kecamatan terhadap agenda politik seperti Pileg (DPR/DPR-RI, DPRD Prop, DPRD Kab. Tabalong) Pilpres/Wapres, maupun Pilkada (Gub/Wagub, Bup/Wabup).

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pertemuan/diskusi publik LSM dengan SKPD Pemkab Tabalong, Peningkatan wawasan Kebangsaan anggota LSM keluar daerah (Surabaya), koordinasi terhadap penerbitan SKT oleh kemendagri dan pembinaan ormas tahun 2025.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan P4GN, diketahanan ekonomi yaitu monitoring terkait kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari besar keagamaan, sosialisasi P4GN dan sosial budaya melalui media spanduk, di bidang keagamaan pembentukan FKUB kecamatan dan desa binaan keagamaan, P4GN pelaksanaan tes urin bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar 6% dari jumlah ASN dan juga pembentukan desa/kelurahan desa besinar.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dengan adanya kerjasama forum-forum dan tim yang sudah di bentuk baik di kabupaten maupun di kecamatan serta kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan konflik sosial di daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kab. Tabalong

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya ‘good governance’, yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD), guna ikut mewujudkan Good Governance Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menginformasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra periode 2019-2025 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan lebih lanjut dan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja pada Tahun 2025.

Tanjung, Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong,



Drs. ARBUANSYAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19730207 199311 1 003